

HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DI INDONESIA 2013 - 2014

Dipresentasikan dalam:

SEMINAR DAN LOKAKARYA

Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan
Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

INDONESIAN MINING INSTITUTE (IMI)

Bandung, 13 November 2014



TUJUAN SURVEI

Survei ini bertujuan untuk membuat kajian (*report card*) yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dalam rangka menarik investasi disektor pertambangan demi pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik

OUTLINE

1.
Informasi Umum
Survei

2.
Metodologi
Survei

3.
Hasil Survei

1. INFORMASI UMUM SURVEI

1. INFORMASI UMUM SURVEI



Merupakan suatu survei untuk mengukur persepsi pelaku pertambangan terhadap kebijakan pertambangan minerba di daerah-daerah utama penghasil sumber daya minerba

550

Responden

55

Perusahaan

20

Kabupaten

Waktu pelaksanaan survei:

○
Jan

○
Feb

○
Mar

○
Apr

○
Mei

○
Jun

○
Jul

○
Ags

2014

1. INFORMASI UMUM SURVEI



Kusioner yang
dibagikan

20 Kabupaten
550 Kuesioner



Kusioner yang
diterima kembali

17 Kabupaten
196 Kuesioner

20 kabupaten dipilih dari sekitar lebih 50 kabupaten yang menerima **dana bagi hasil** lebih dari 20 miliar rupiah di tahun 2012 (berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 312/2013)

Survei ini merupakan penilaian atas persepsi dari pelaku industri pertambangan. Hasil survei sangat bergantung dari pengetahuan, pengalaman, dan penilaian dari masing-masing individu responden.

Pemilihan kabupaten yang dijadikan obyek survei bukan semata-mata mengambil 20 kabupaten dengan dana bagi hasil teratas, tetapi pemilihan kabupaten tersebut juga didasarkan atas pertimbangan pemerataan sesuai dengan provinsi di Indonesia.

Peringkat dalam hasil survei ini bukanlah merupakan peringkat yang mutlak karena masih ada kabupaten lain yang belum diikuti dalam survei tahun ini.



2. METODOLOGI SURVEI

2. METODOLOGI SURVEI

Survei dibagi menjadi 3 Bagian:

Bagian 1

- 18 pertanyaan untuk memperoleh persepsi profesional pertambangan mengenai keadaan kebijakan suatu kabupaten dalam mendukung kegiatan pertambangan

Bagian 2

- Survei mengenai pola investasi perusahaan pertambangan di Indonesia

Bagian 3

- Komentar umum responden tentang keadaan penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertambangan

2. METODOLOGI SURVEI



Pertanyaan pada Bagian 1

No	Pertanyaan
1	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
2	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
3	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
5	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
6	Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, dan tidak korup, tepat waktu, efisien)
7	Rezim Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)
8	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
9	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
10	Ketersediaan infrastruktur

2. METODOLOGI SURVEI



Pertanyaan pada Bagian 1

No	Pertanyaan
11	Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)
12	Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)
13	Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
14	Peraturan ketenagakerjaan
15	Keamanan lokal
16	Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
17	Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
18	Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya

2. METODOLOGI SURVEI



Respon untuk Bagian 1

- 1 = Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 2 = Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 3 = Agak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 4 = Sangat menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 5 = Tidak akan mengupayakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di kabupaten.

3. HASIL SURVEI



3. HASIL SURVEI

Terdapat 5 indeks yang menggambarkan hasil survei, yaitu:

1. Indeks Potensi Kebijakan
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*
4. Ruang untuk Peningkatan
5. Indeks Komposit



1. Indeks Potensi Kebijakan

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah. Semakin tinggi indeks ini berarti semakin baik kondisi kebijakan yang diterapkan pada daerah tersebut

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-18) dengan cara menghitung persentase responden yang menjawab pilihan 1 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut

1. Indeks Potensi Kebijakan

Ranking	Kabupaten	Nilai
1	Kutai Timur	27,21
2	Barito Utara	24,07
3	Kolaka	23,05
4	Morowali	17,90
5	Luwu Timur	16,60
6	Kutai Kartanegara	14,34
7	Balangan	13,14
8	Tabalong	13,14
9	Muara Enim	12,59
10	Berau	9,35
11	Mimika	8,68
12	Bangka	7,50
13	Tapanuli Selatan	6,36
14	Kota Samarinda	6,33
15	Tanah Bumbu	2,97
16	Nunukan	0,00
17	Sumbawa Barat	0,00



2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

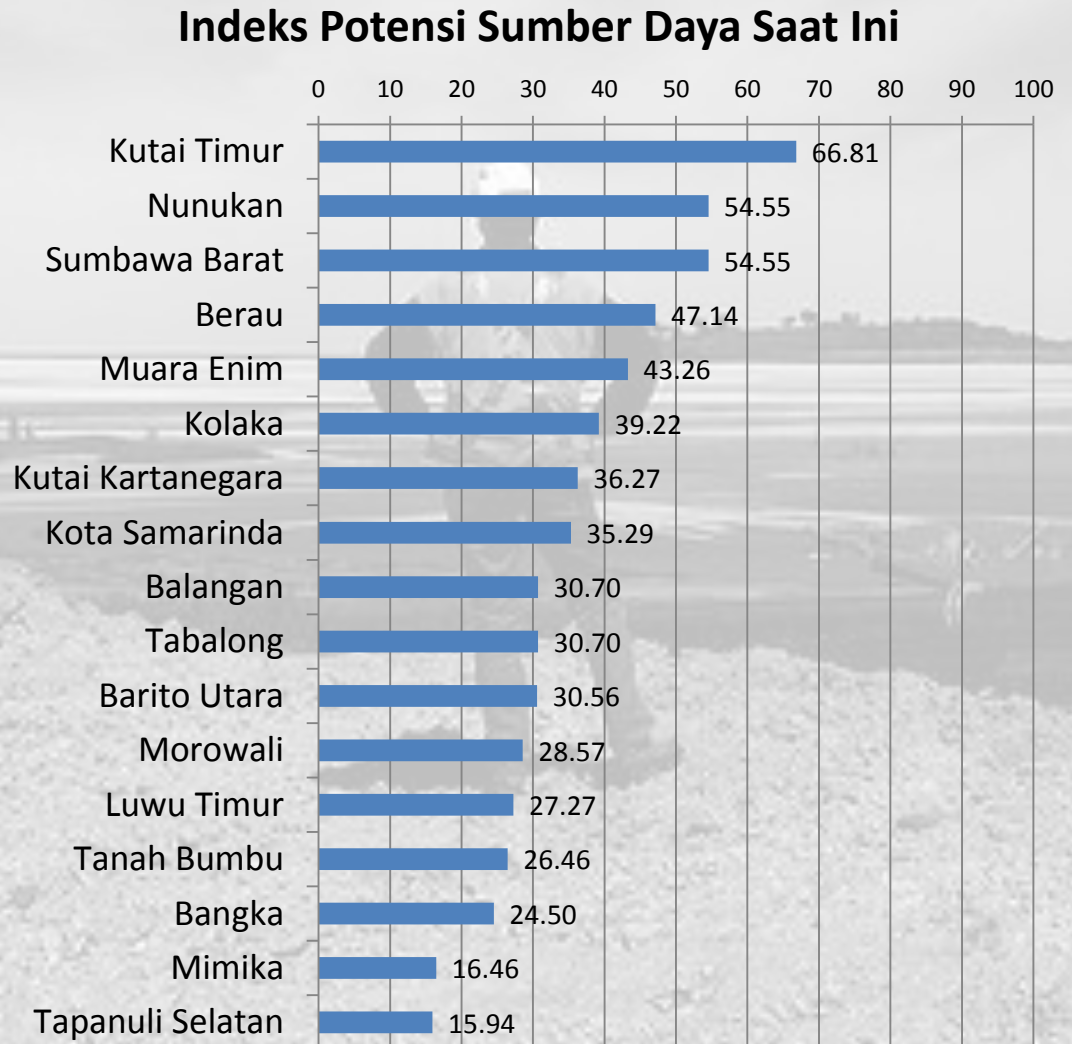
Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut. Nilai yang rendah pada indeks ini menggambarkan adanya potensi-potensi sumber daya yang tidak dapat dikembangkan/ dieksploitasi karena adanya hambatan dari kebijakan yang diterapkan .

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15,18) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini		
Ranking	Kabupaten	Nilai
1	Kutai Timur	66,81
2	Nunukan	54,55
3	Sumbawa Barat	54,55
4	Berau	47,14
5	Muara Enim	43,26
6	Kolaka	39,22
7	Kutai Kartanegara	36,27
8	Kota Samarinda	35,29
9	Balangan	30,70
10	Tabalong	30,70
11	Barito Utara	30,56
12	Morowali	28,57
13	Luwu Timur	27,27
14	Tanah Bumbu	26,46
15	Bangka	24,50
16	Mimika	16,46
17	Tapanuli Selatan	15,94



3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut apabila kebijakan suatu daerah dikelola dengan baik. Indeks ini mengasumsikan beberapa kebijakan telah dikelola dengan baik.



3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15,18) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

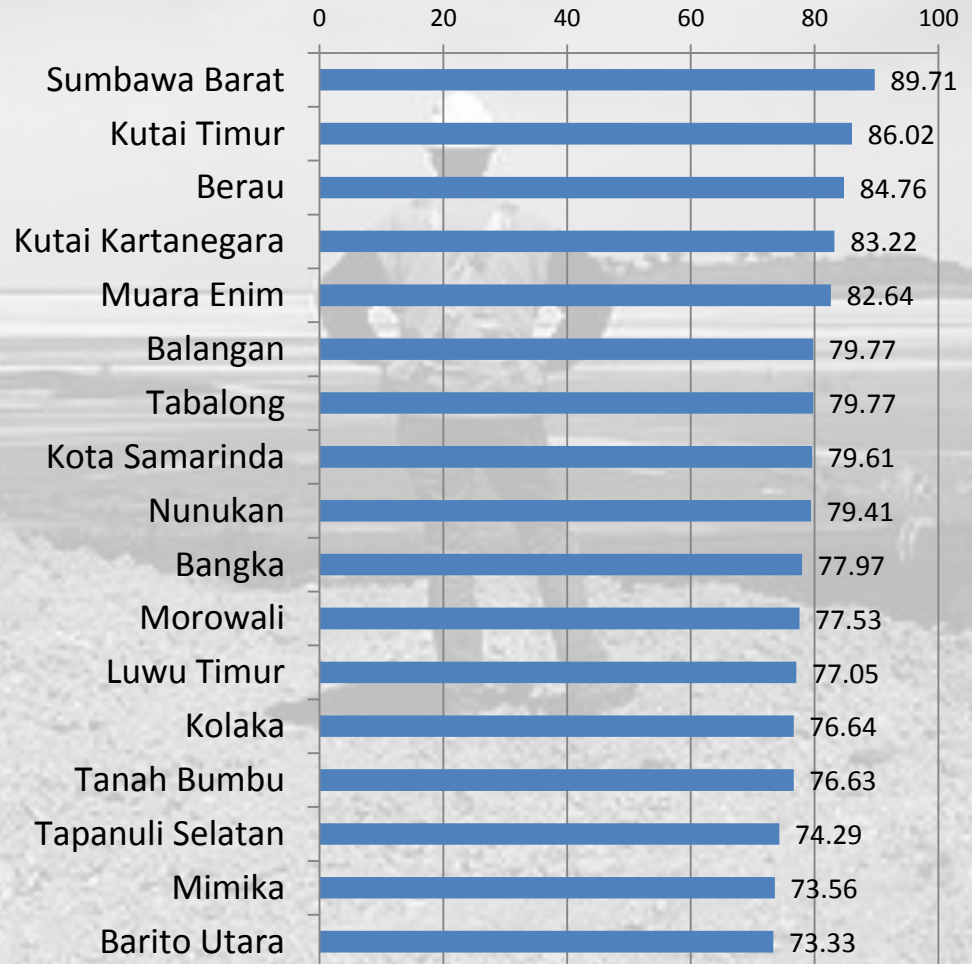
Namun untuk pertanyaan 1,2,7,8,9,13 jawaban responden akan diasumsikan menjadi pilihan 1 karena diasumsikan kebijakan di daerah tersebut telah dikelola dengan baik.

3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Ranking	Kabupaten	Nilai
1	Sumbawa Barat	89,71
2	Kutai Timur	86,02
3	Berau	84,76
4	Kutai Kartanegara	83,22
5	Muara Enim	82,64
6	Balangan	79,77
7	Tabalong	79,77
8	Kota Samarinda	79,61
9	Nunukan	79,41
10	Bangka	77,97
11	Morowali	77,53
12	Luwu Timur	77,05
13	Kolaka	76,64
14	Tanah Bumbu	76,63
15	Tapanuli Selatan	74,29
16	Mimika	73,56
17	Barito Utara	73,33

Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*



4. Ruang untuk Peningkatan

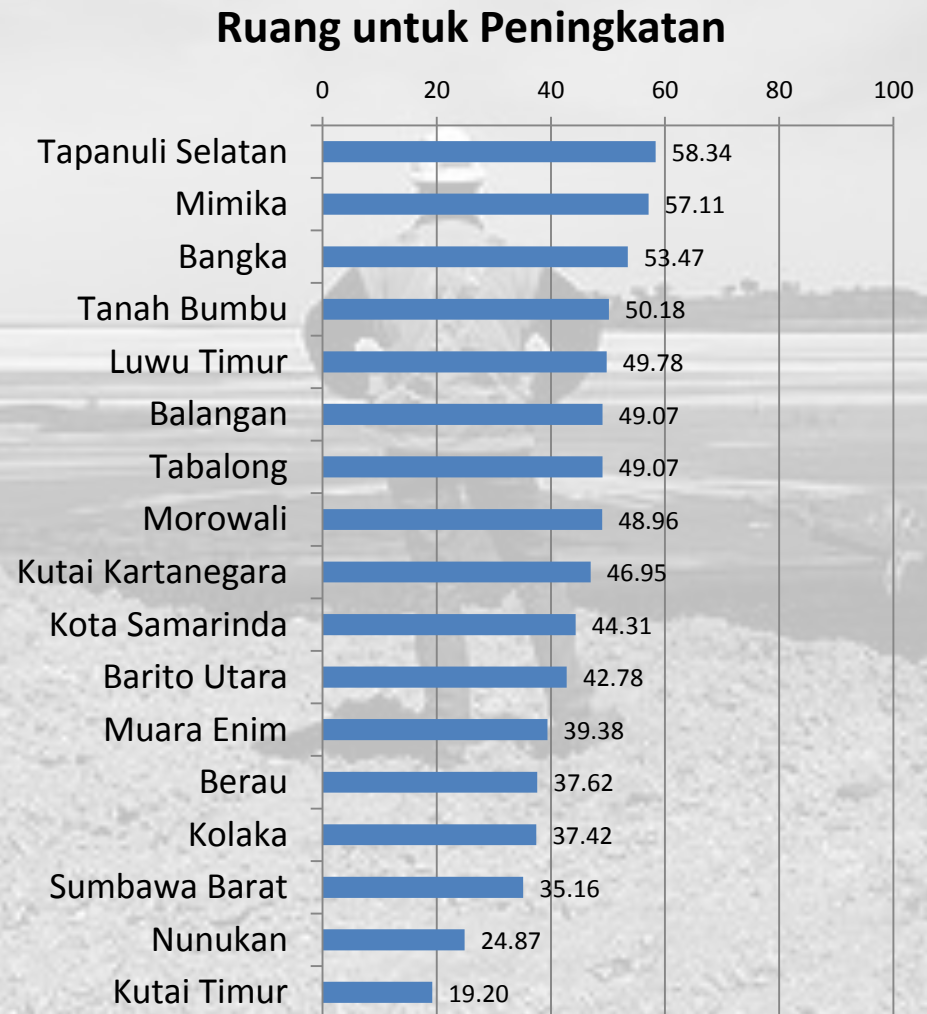
Merupakan Indeks yang menggambarkan seberapa jauh suatu daerah dapat berkembang apabila kebijakan dikelola dengan baik

Dinilai dari selisih hasil Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* dan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini



4. Ruang untuk Peningkatan

Ruang untuk Peningkatan		
Ranking	Kabupaten	Nilai
1	Tapanuli Selatan	58,34
2	Mimika	57,11
3	Bangka	53,47
4	Tanah Bumbu	50,18
5	Luwu Timur	49,78
6	Balangan	49,07
7	Tabalong	49,07
8	Morowali	48,96
9	Kutai Kartanegara	46,95
10	Kota Samarinda	44,31
11	Barito Utara	42,78
12	Muara Enim	39,38
13	Berau	37,62
14	Kolaka	37,42
15	Sumbawa Barat	35,16
16	Nunukan	24,87
17	Kutai Timur	19,20



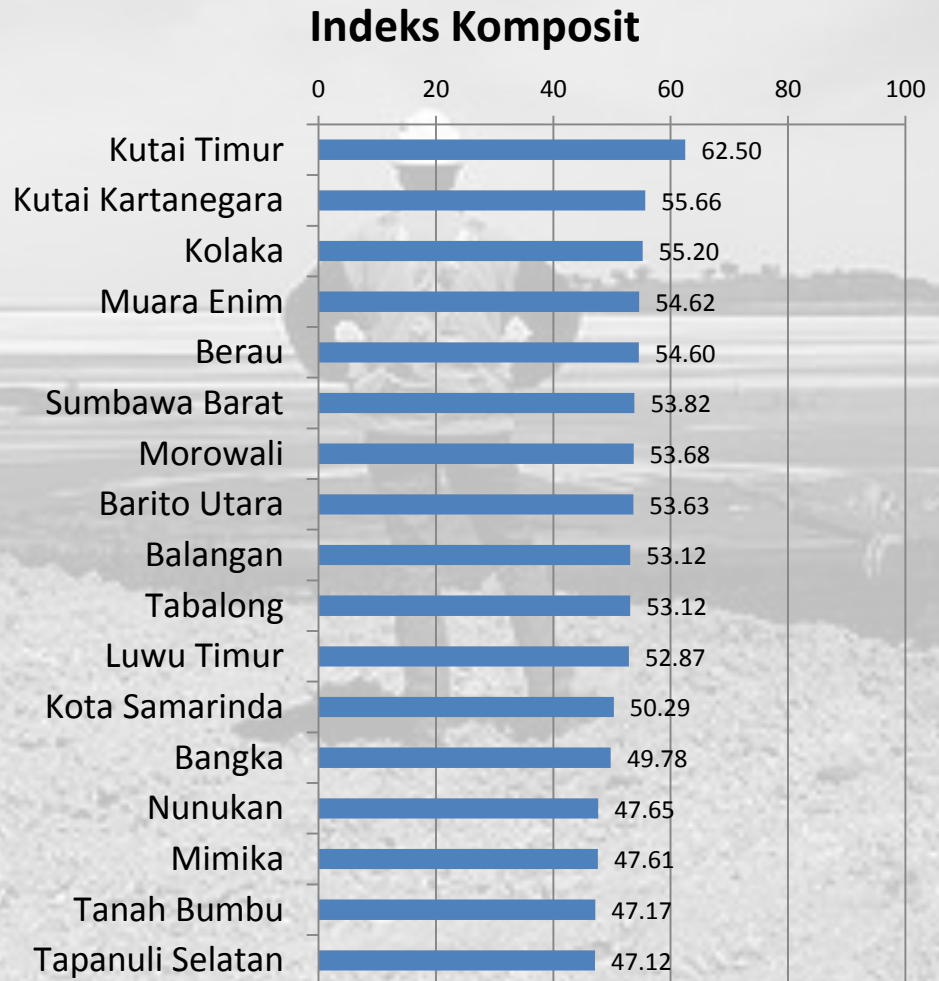
5. Indeks Komposit

Merupakan Indeks gabungan yang menggambarkan keadaan kebijakan dari suatu daerah dan potensi sumber daya pada daerah tersebut

Dinilai dari rata-rata hasil Indeks Potensi Kebijakan dan Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* dengan pembobotan berturut-turut 40 : 60. Diasumsikan bahwa potensi sumber daya lebih mempengaruhi keadaan pertambangan di suatu daerah.

5. Indeks Komposit

Indeks Komposit		
Ranking	Kabupaten	Nilai
1	Kutai Timur	62,50
2	Kutai Kartanegara	55,66
3	Kolaka	55,20
4	Muara Enim	54,62
5	Berau	54,60
6	Sumbawa Barat	53,82
7	Morowali	53,68
8	Barito Utara	53,63
9	Balangan	53,12
10	Tabalong	53,12
11	Luwu Timur	52,87
12	Kota Samarinda	50,29
13	Bangka	49,78
14	Nunukan	47,65
15	Mimika	47,61
16	Tanah Bumbu	47,17
17	Tapanuli Selatan	47,12



6. Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan

Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute

Indeks	IMI	Fraser	
	2013 - 2014	2012 - 2013	2013
Indeks Potensi Kebijakan	13,29	9,4	15,30
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini	34,89	25	23
Indeks Potensi Sumber Daya <i>Best Practice</i>	80,48	79	73
Ruang untuk Peningkatan	45,59	54	50
Indeks Komposit	53,60	51,16	49,8

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan

Peringkat	Hambatan yang dihadapi
1	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
2	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten
3	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah
4	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen
5	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
6	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
7	Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya
8	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
9	Rezim Perpajakan

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan (lanjutan)

Peringkat	Hambatan yang dihadapi
10	Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, korup, tepat waktu, efisien)
11	Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)
12	Ketersediaan infrastruktur
13	Keamanan lokal
14	Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
15	Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
16	Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat
17	Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
18	Peraturan Perburuhan / ketenagakerjaan

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Berikut merupakan uraian hambatan yang yang paling dirasakan oleh pelaku pertambangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas kebijakan di masing-masing kabupaten.

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Tapanuli Selatan	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
Muara Enim	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada• Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten (lanjutan)

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Nunukan	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah
Tanah Bumbu	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten
Balangan	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Barito Utara	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
Kota Samarinda	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Berau	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
Tabalong	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten (lanjutan)

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Kolaka	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
Morowali	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen
Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Bangka	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Mimika	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen
Sumbawa barat	<ul style="list-style-type: none">• Rezim Perpajakan• Peraturan Perburuhan / ketenagakerjaan

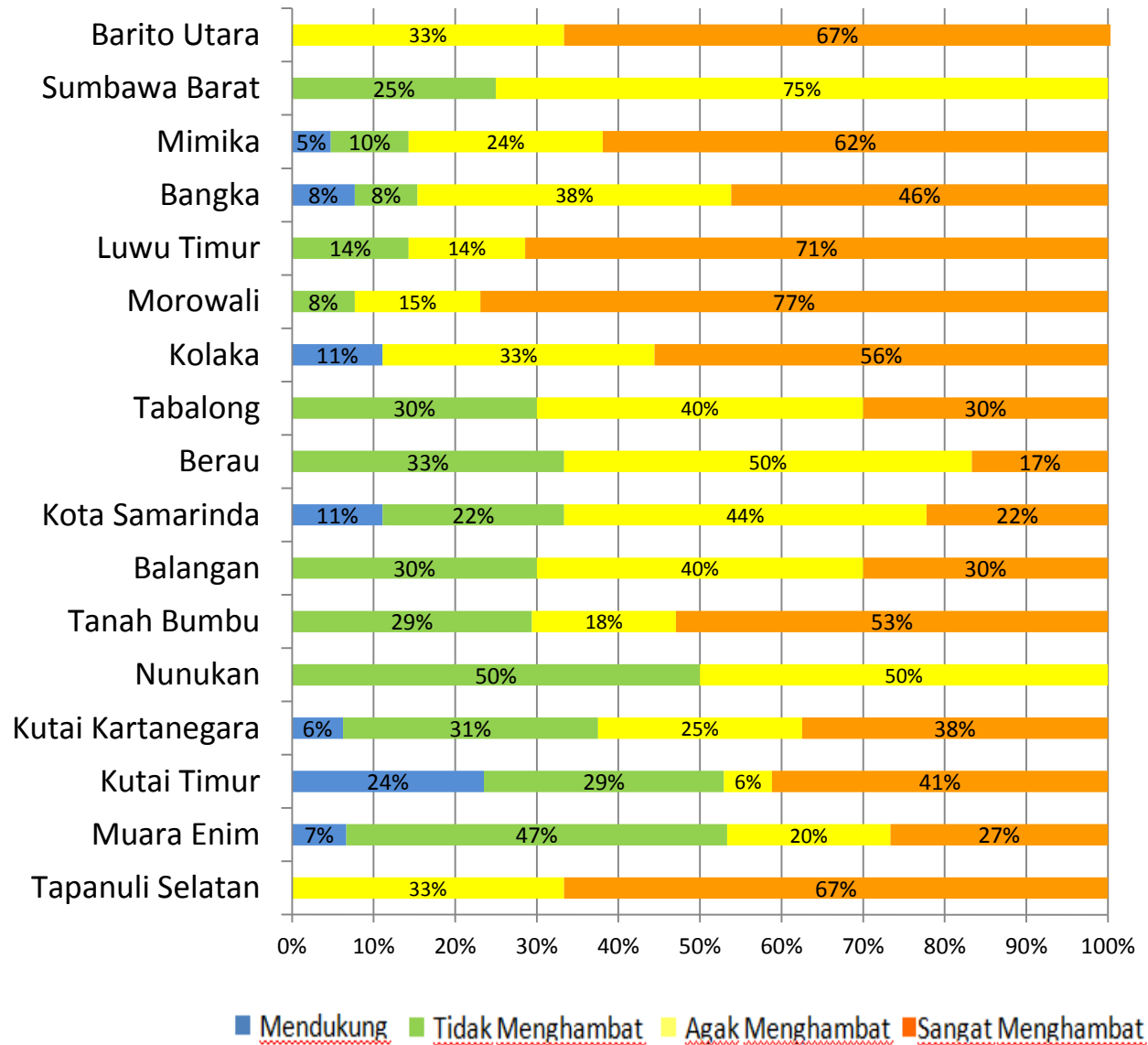


TERIMA KASIH

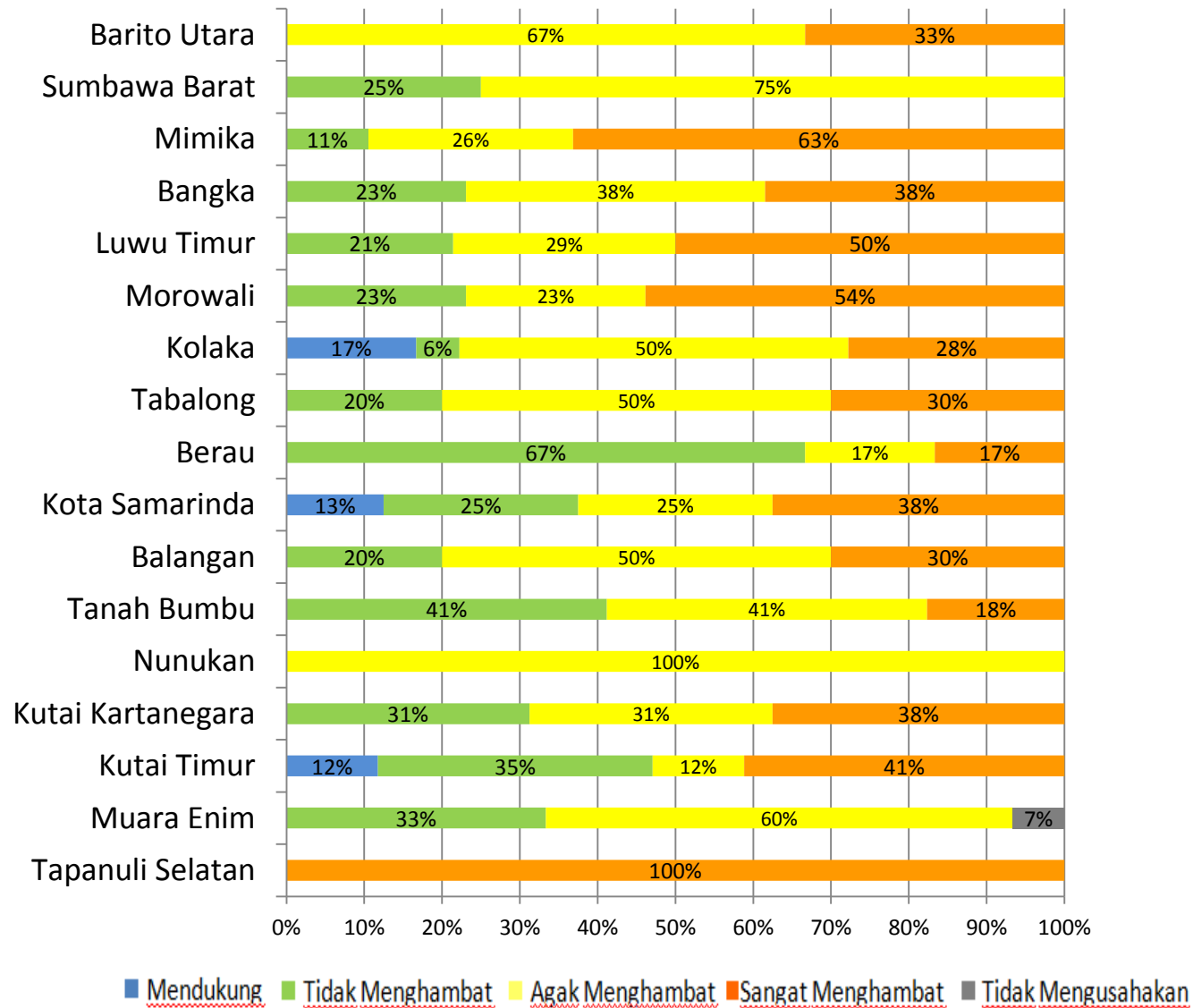
Lampiran:

Uraian Hambatan yang Dialami oleh Kegiatan
Pertambangan di Daerah

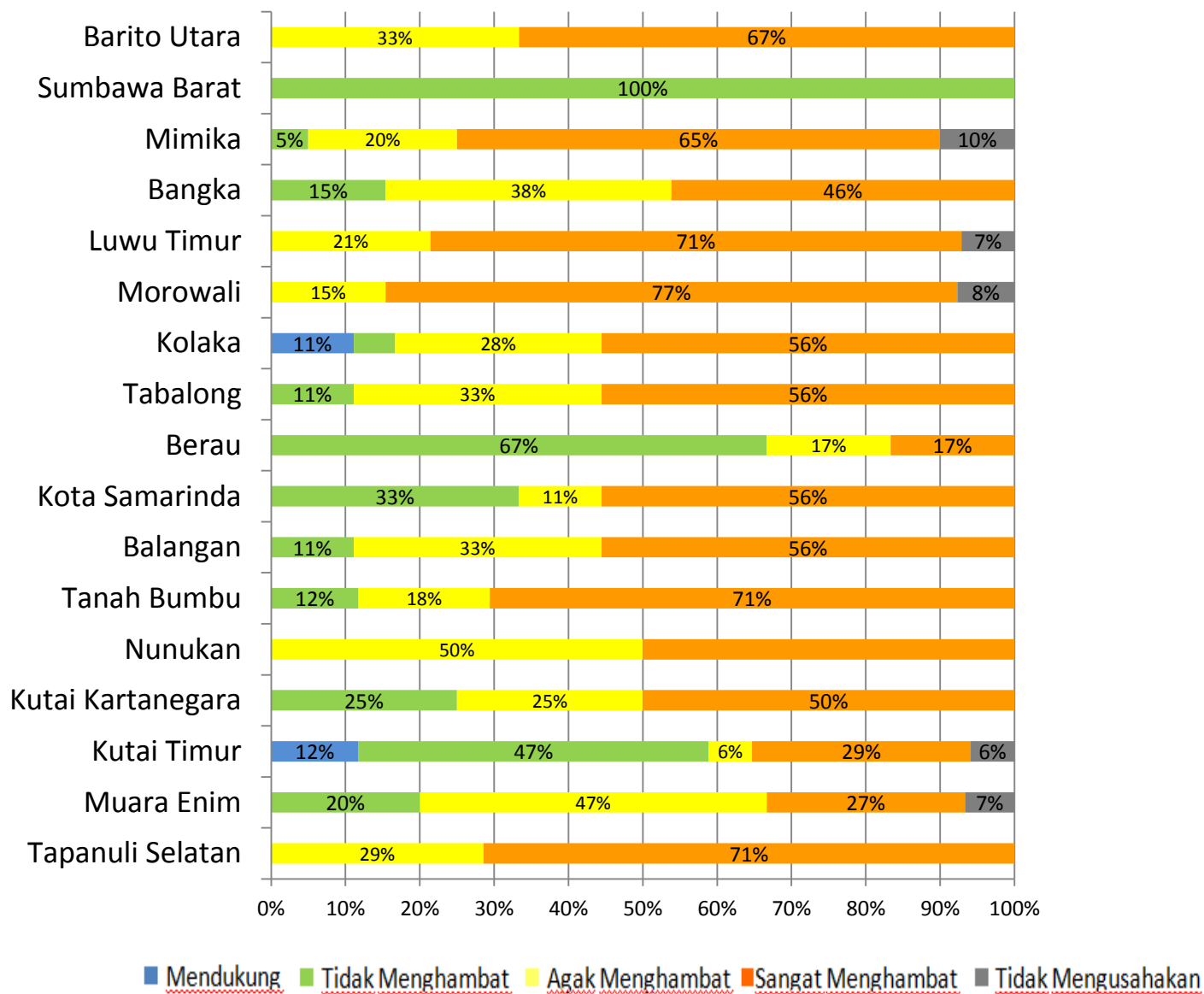
Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada



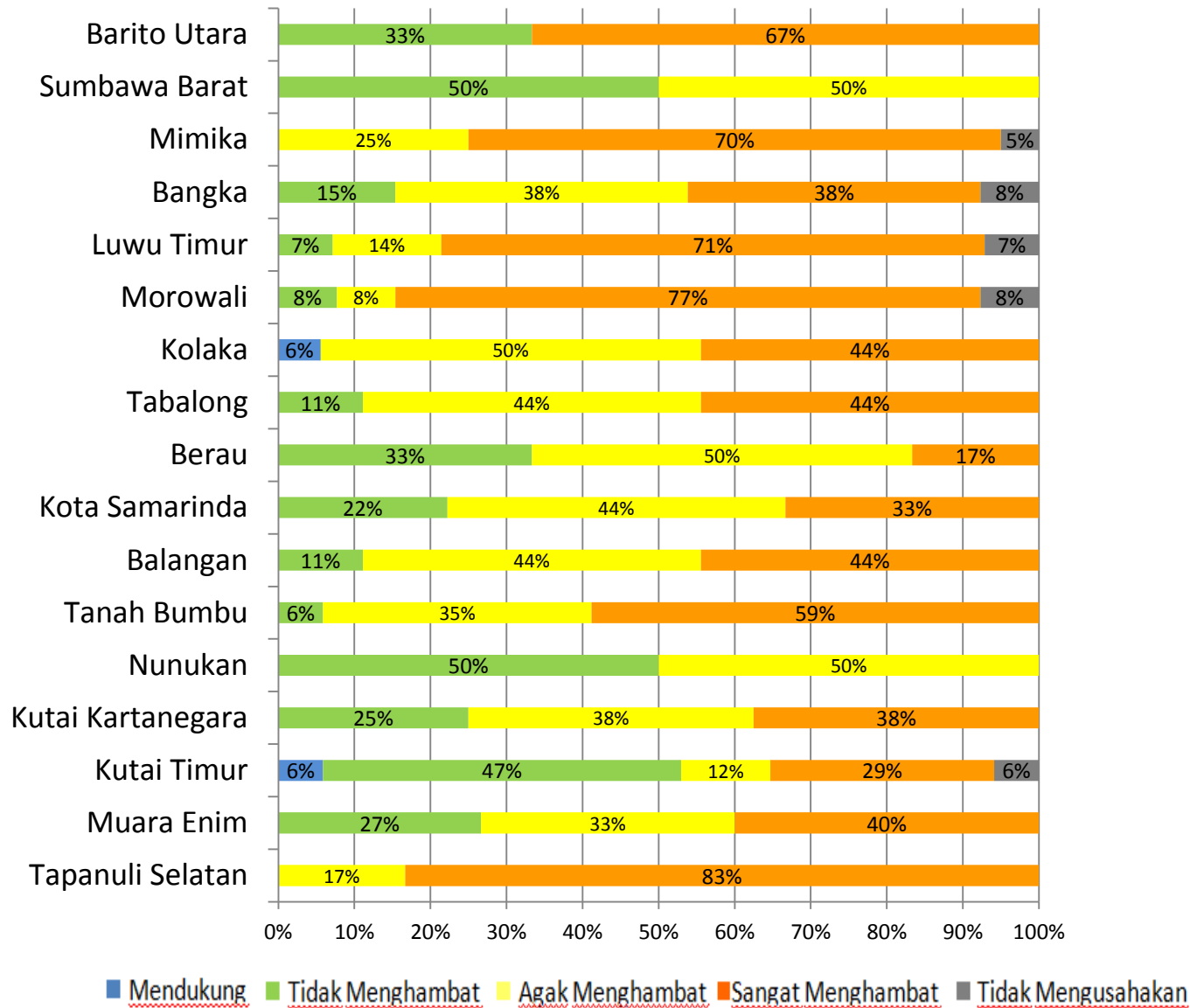
Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah



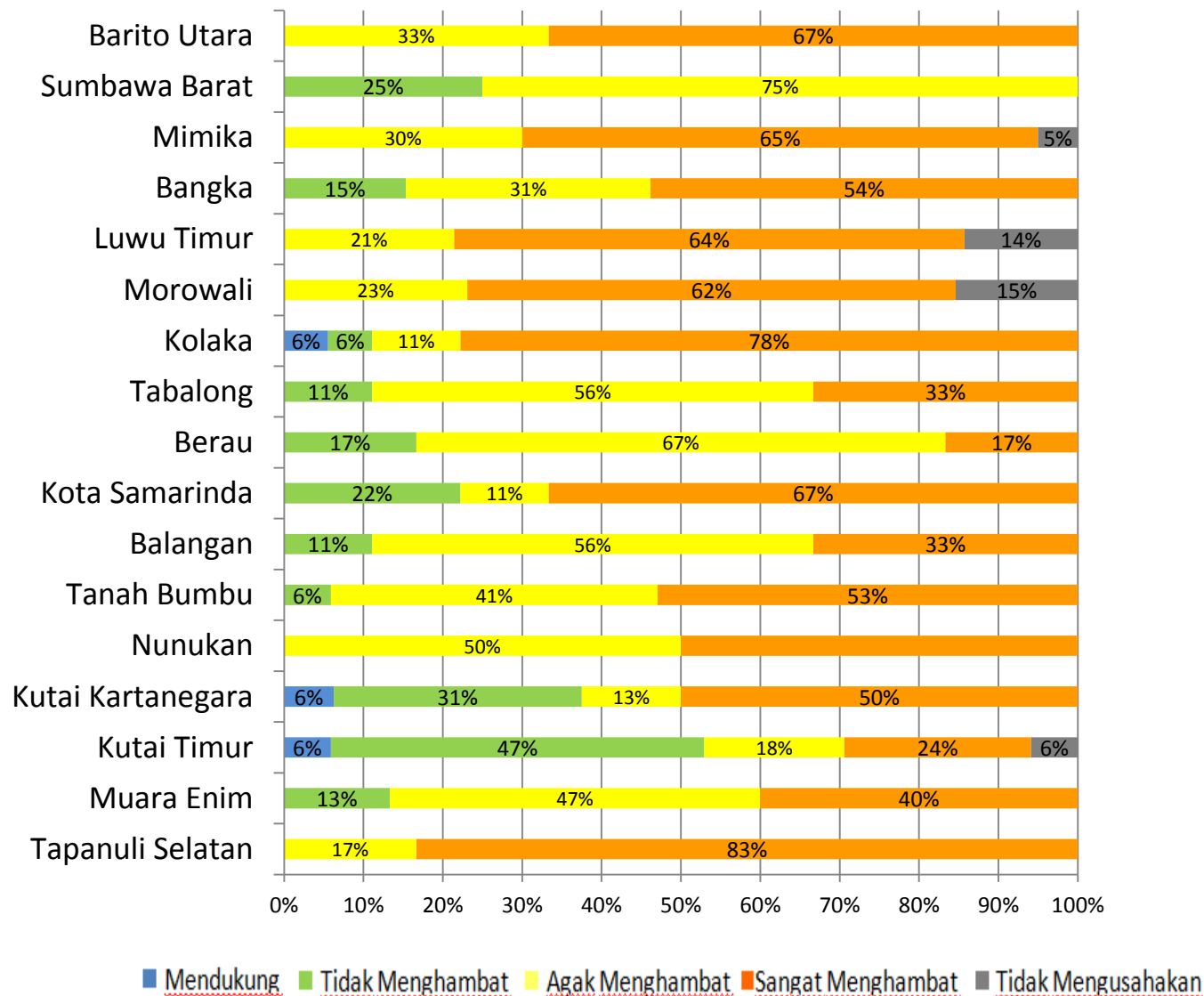
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten



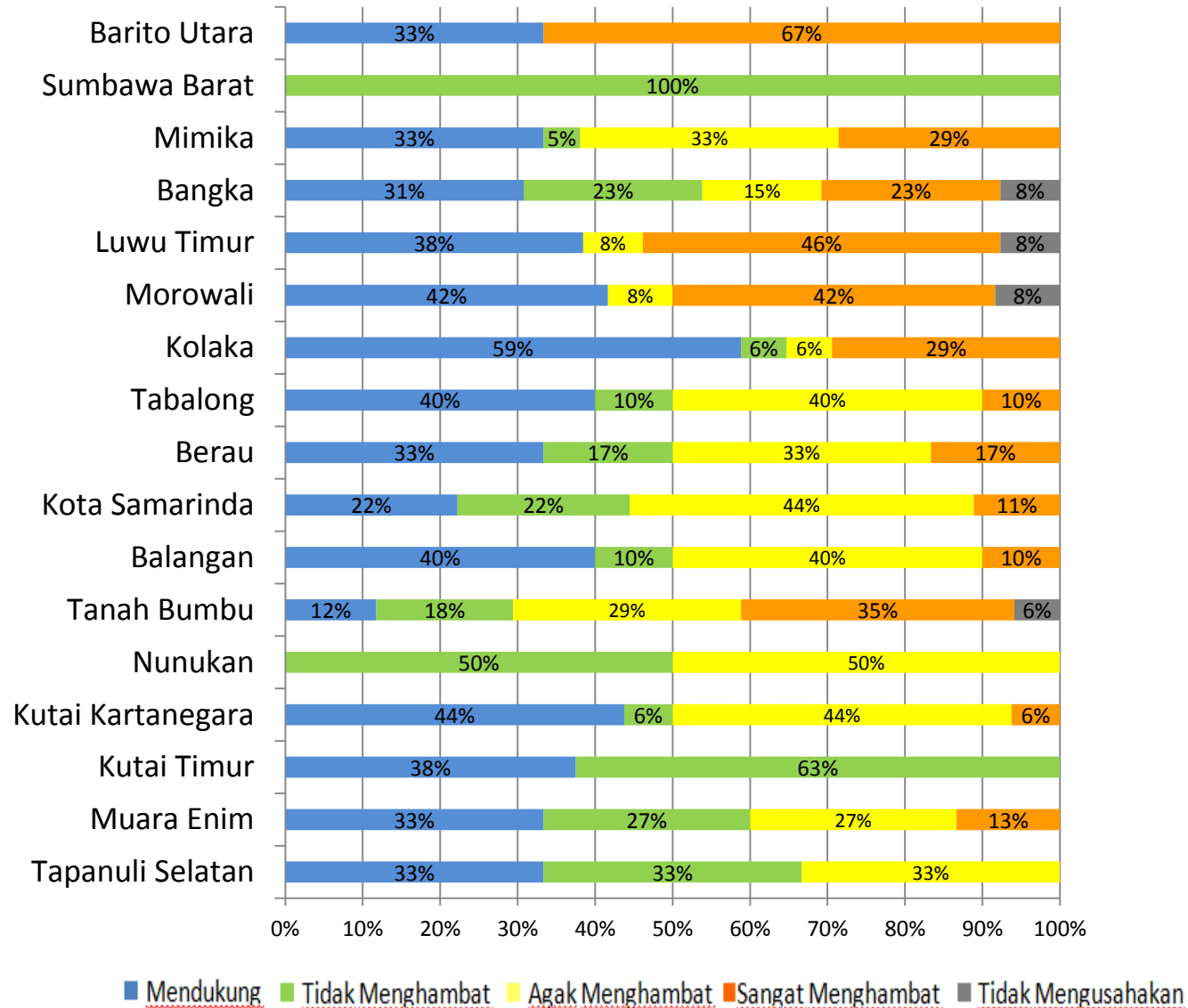
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen



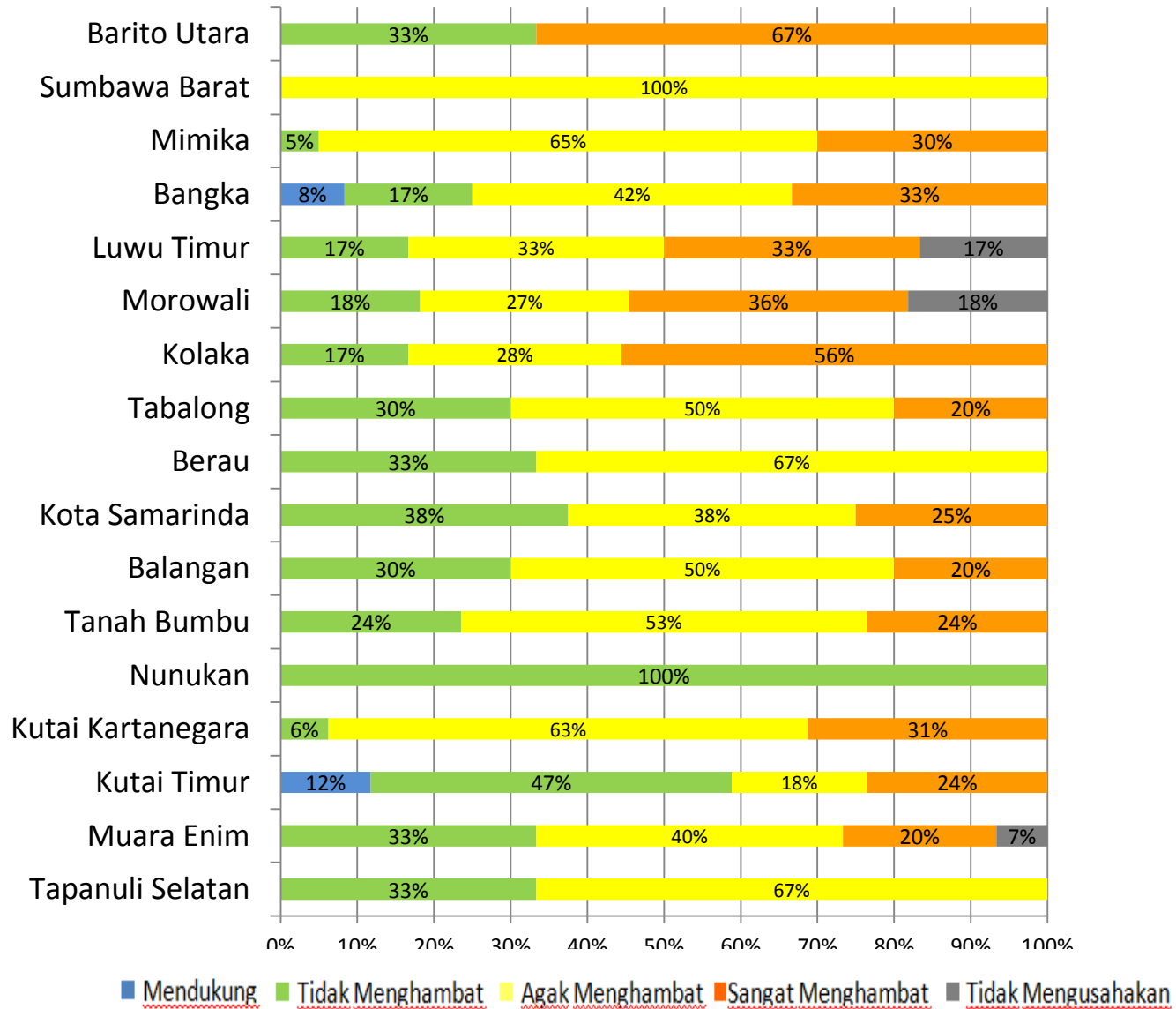
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah



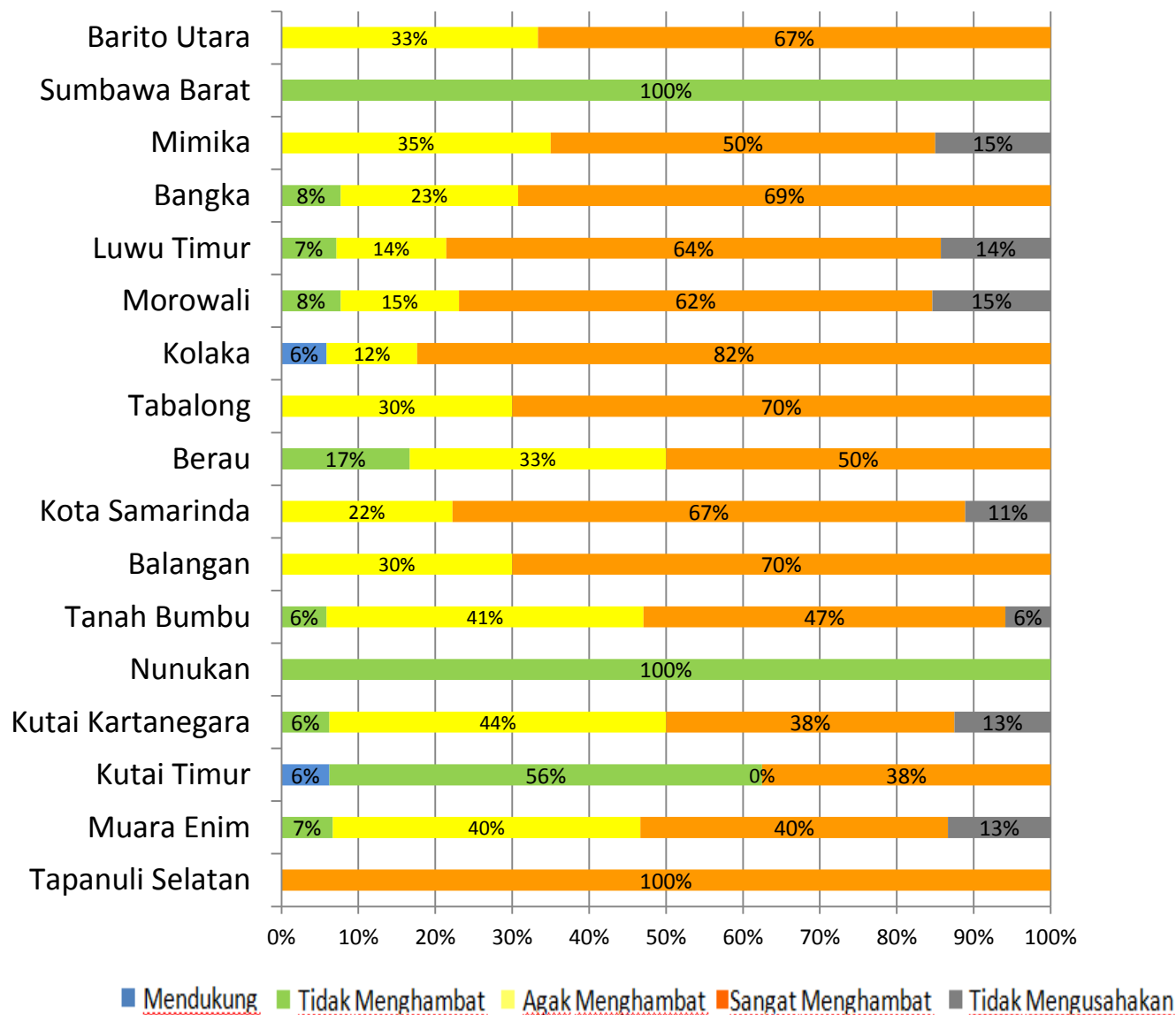
Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, dan tidak korup, tepat waktu, efisien)



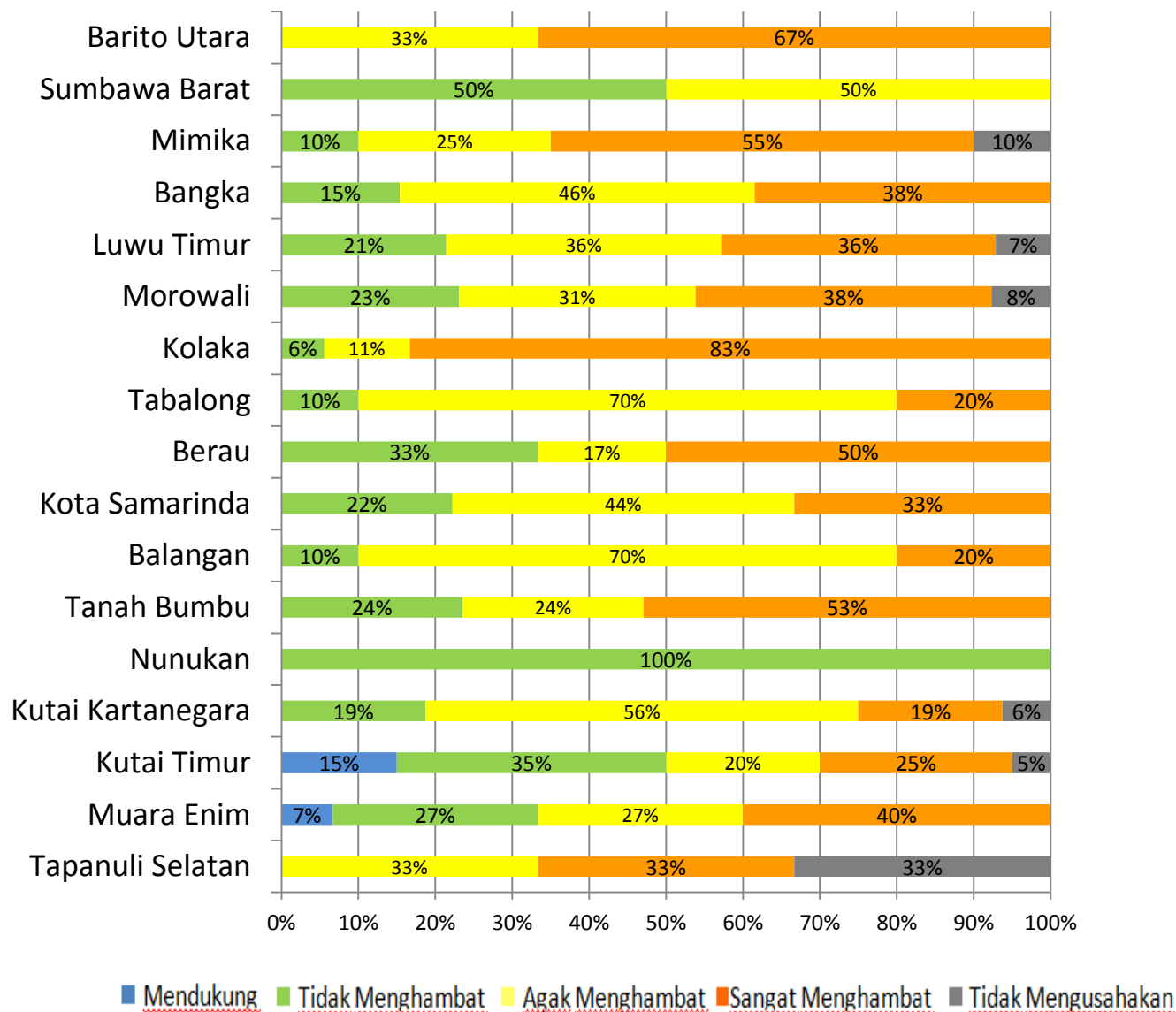
Perpajakan



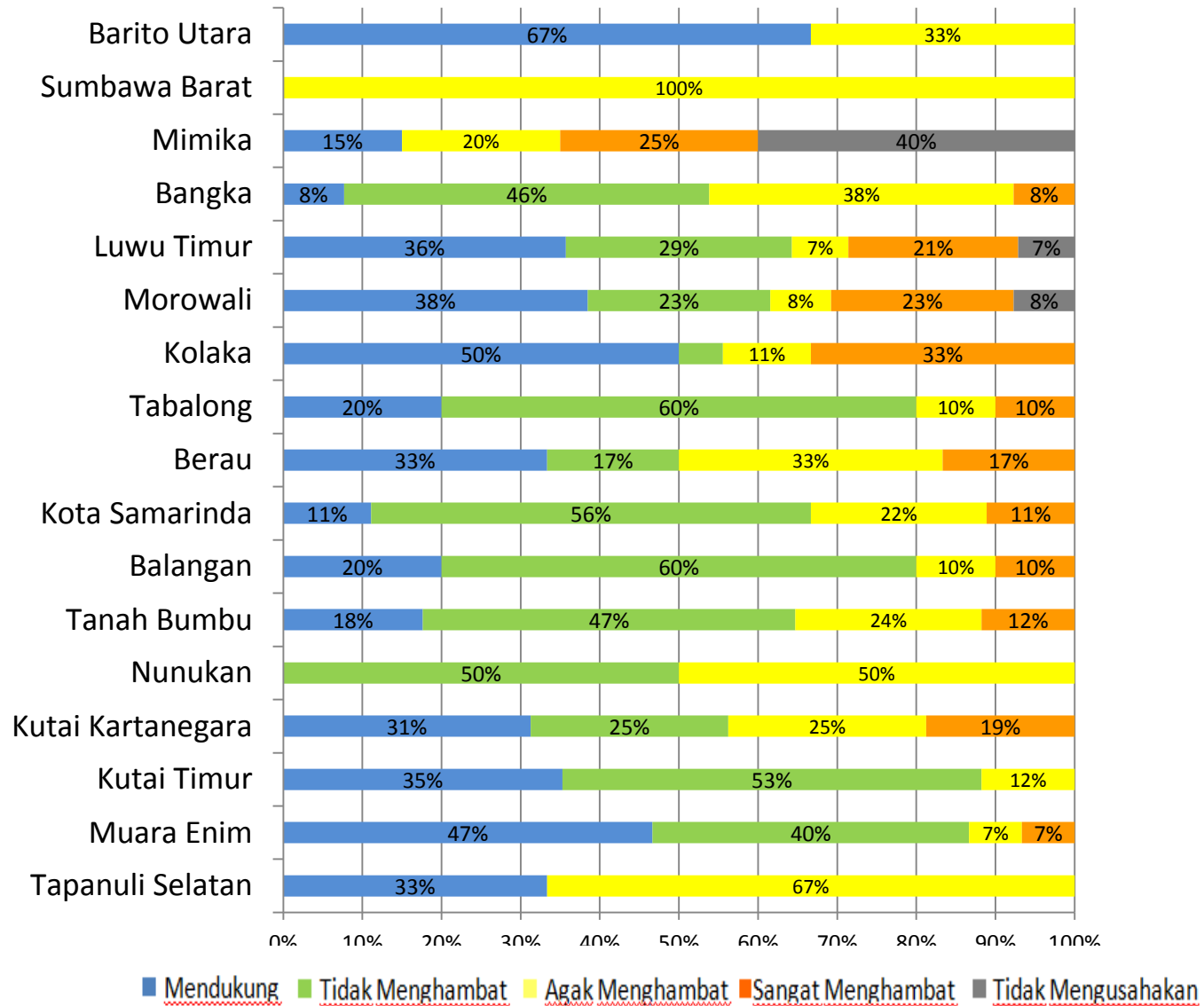
Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa



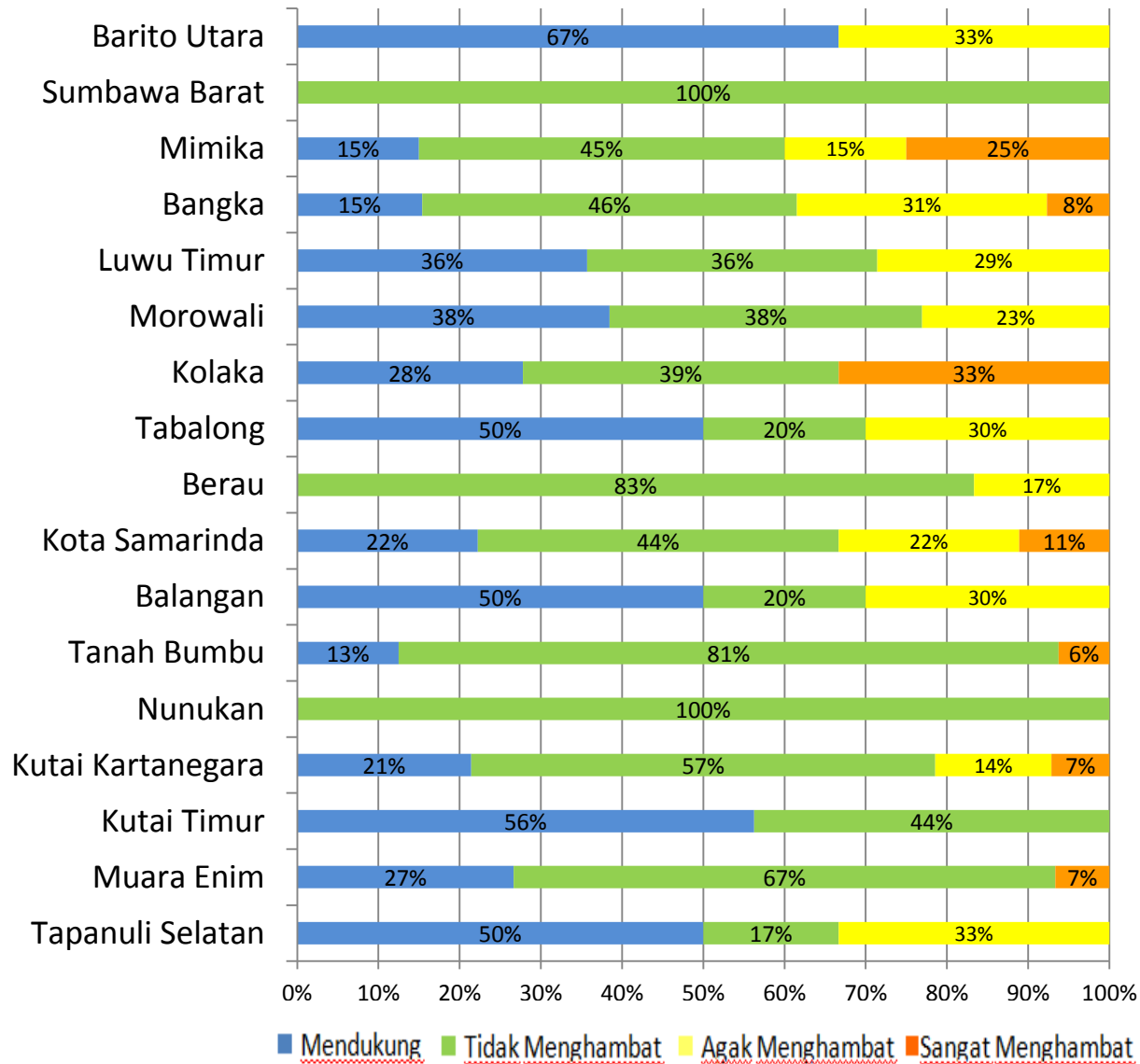
Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi



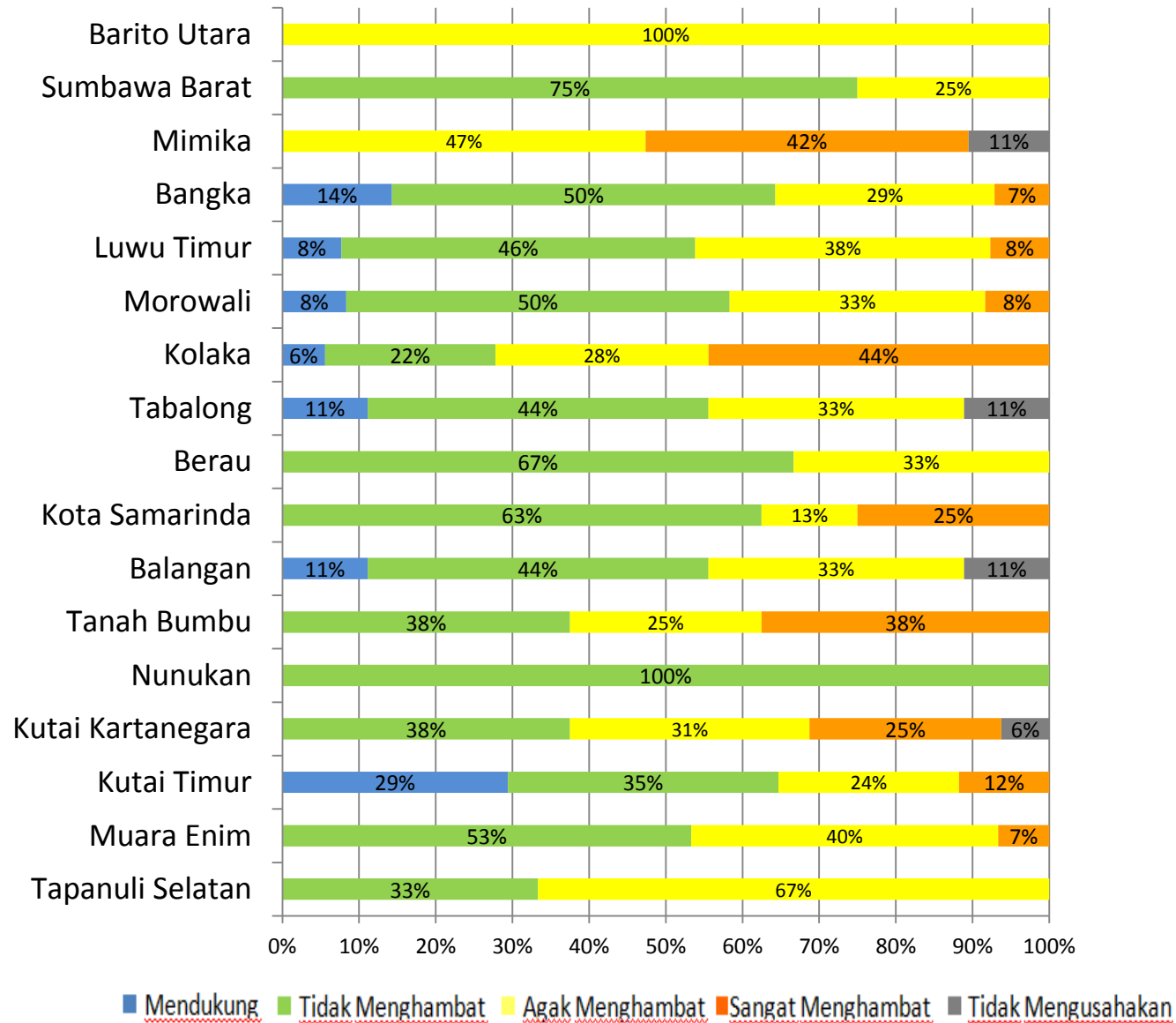
Ketersediaan infrastruktur



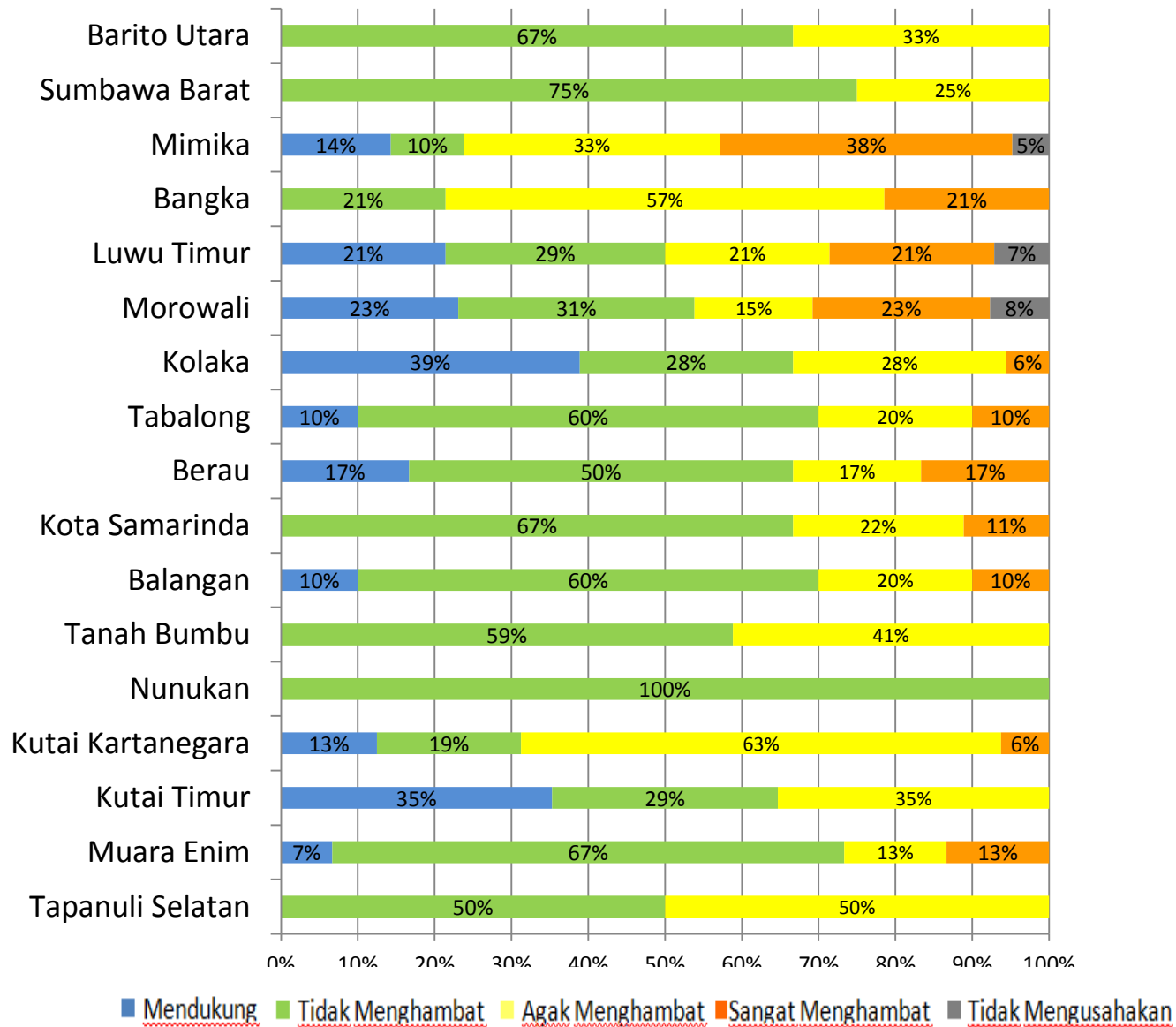
Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi



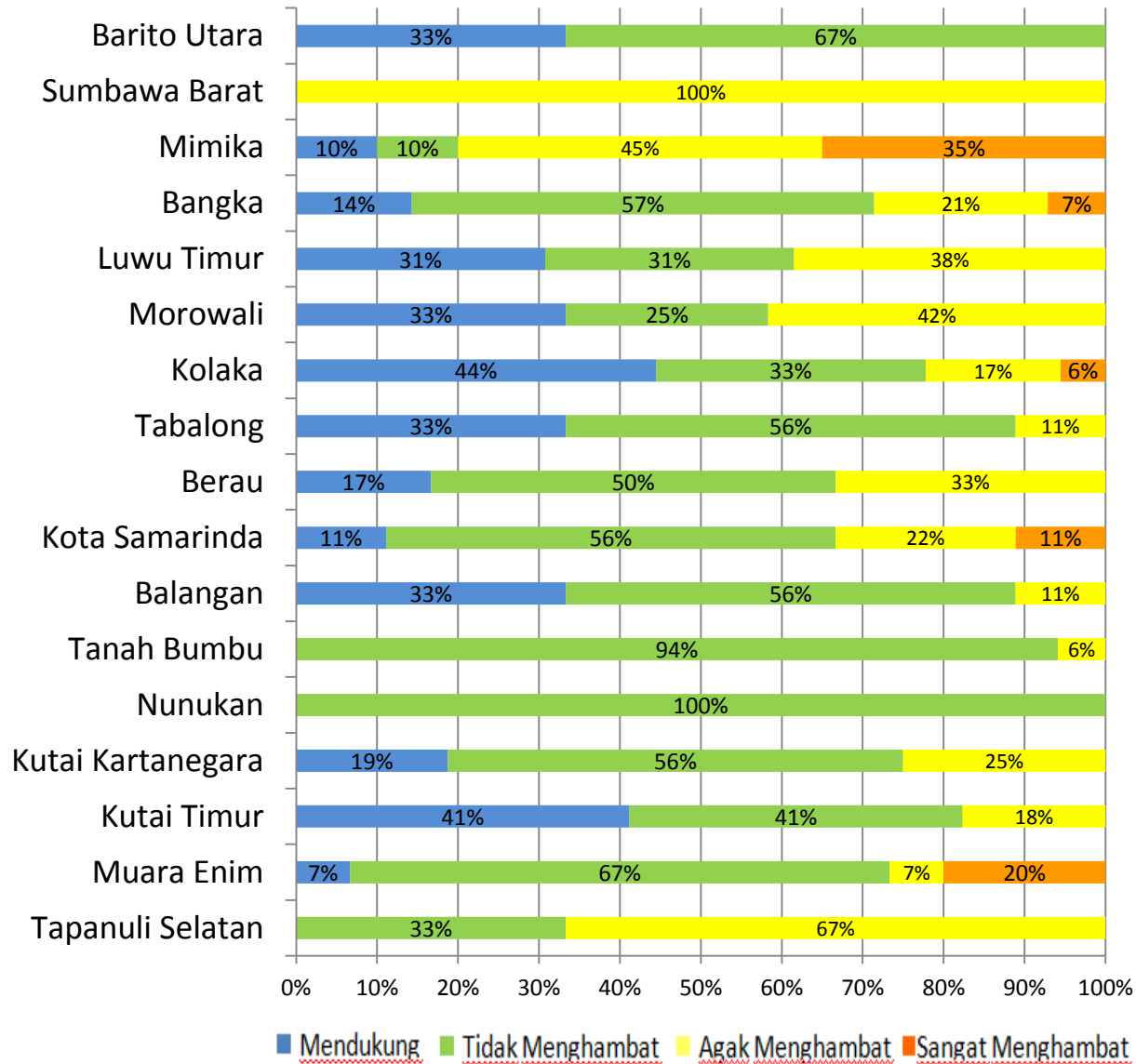
Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)



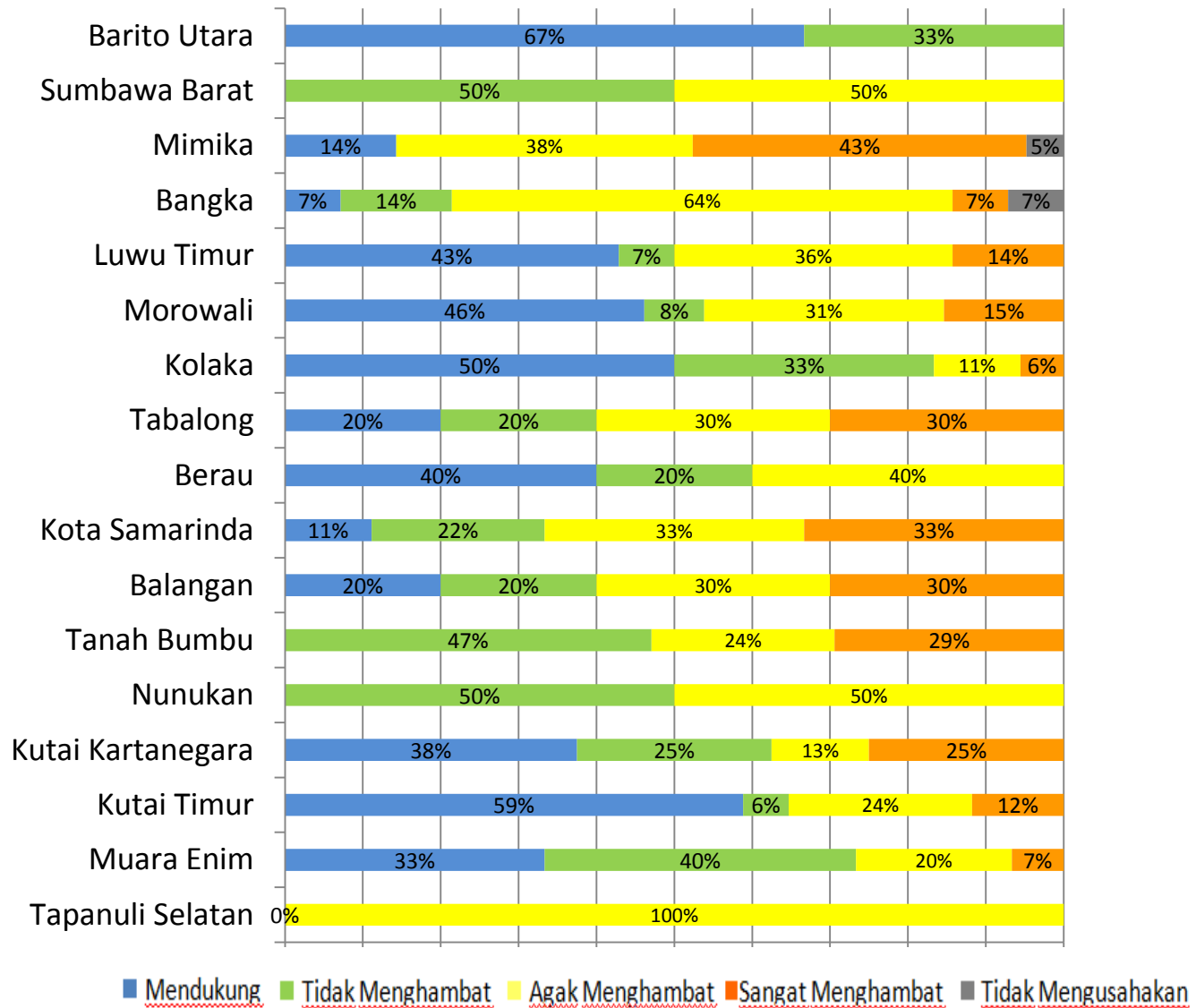
Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat



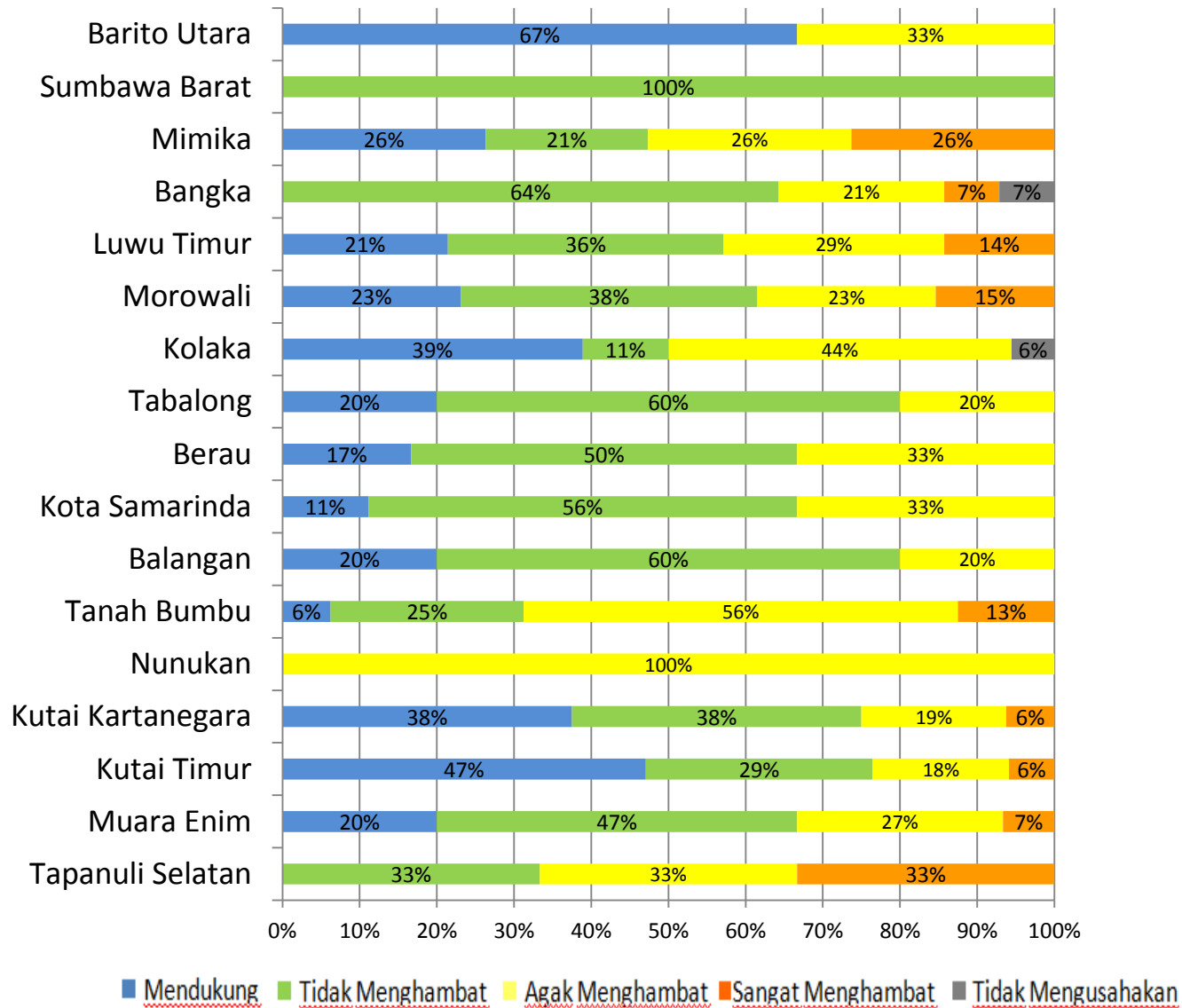
Peraturan Perburuhan / ketenagakerjaan



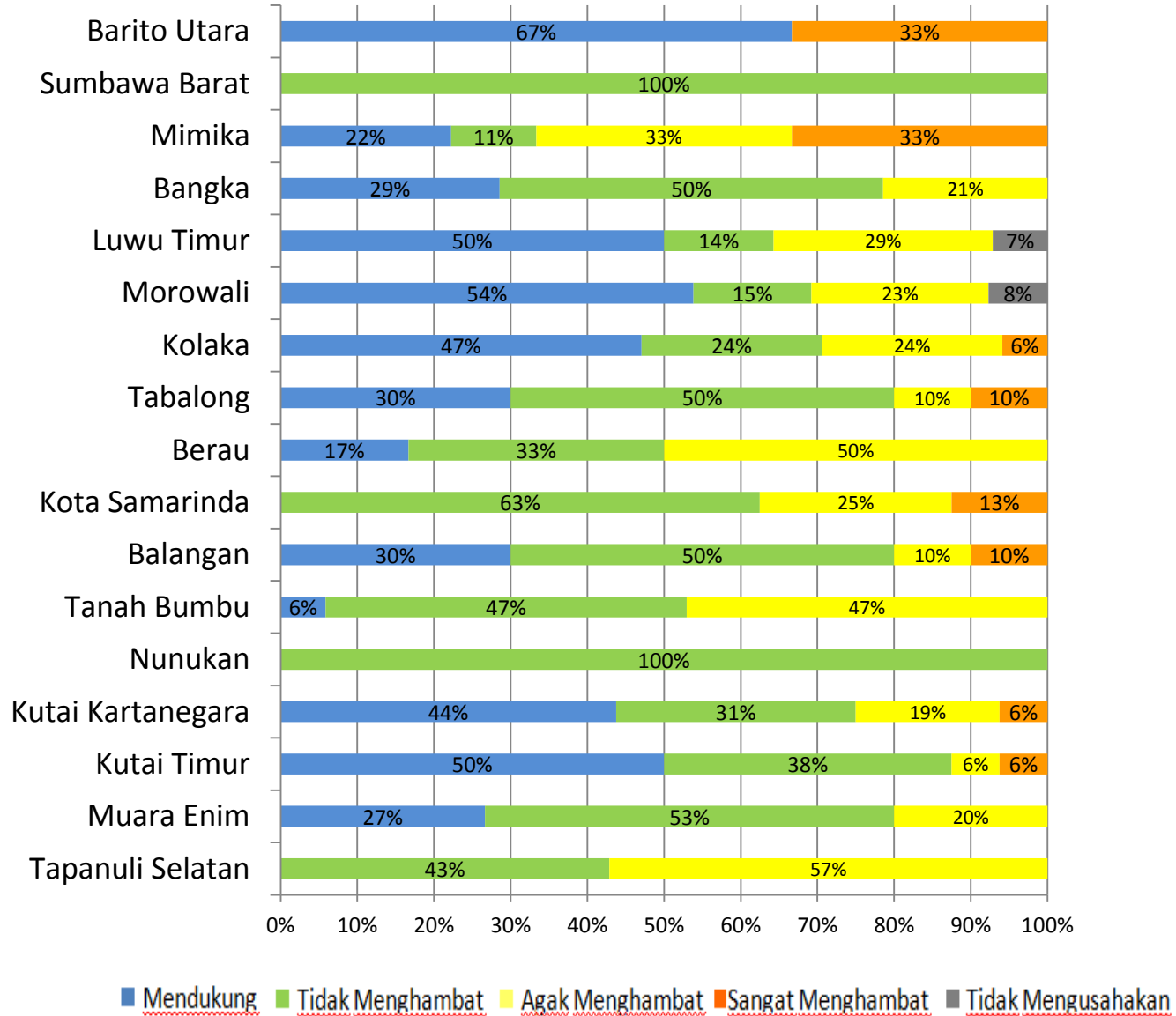
Keamanan lokal



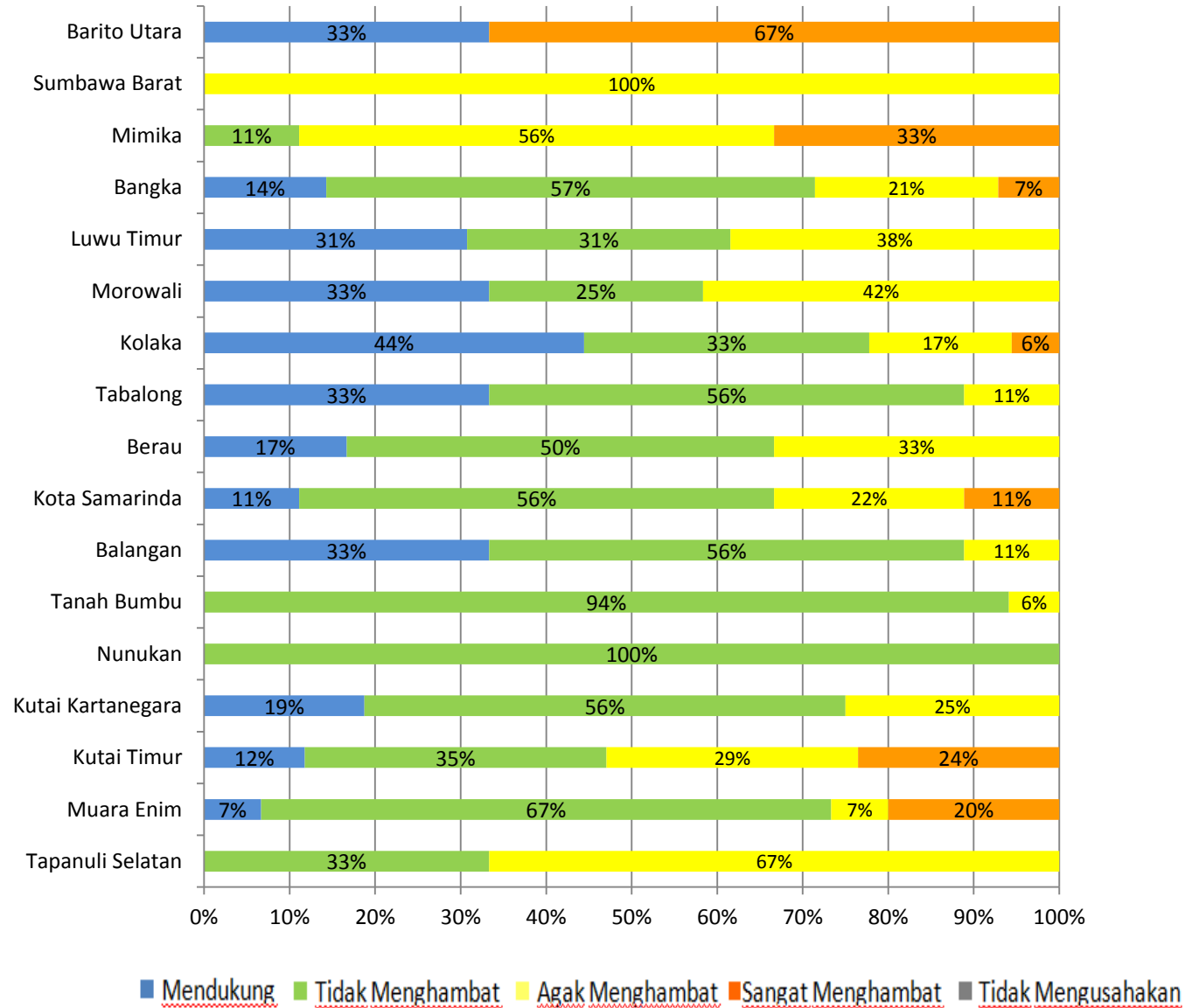
Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah



Ketersediaan tenaga kerja



Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya



Uraian Hambatan yang Dialami Secara Keseluruhan

No	Hambatan	1+2+3	4+5
1	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada	53,6%	46,4%
2	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah	63,4%	36,6%
3	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten	43,8%	56,3%
4	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen	48,7%	51,3%
5	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah	45,0%	55,0%
6	Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, dan tidak korup, tepat waktu, efisien)	76,8%	23,2%
7	Rezim Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)	69,5%	30,5%
8	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa	37,2%	62,8%
9	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi	56,1%	43,9%
10	Ketersediaan infrastruktur	80,3%	19,7%

Uraian Hambatan yang Dialami Secara Keseluruhan

No	Hambatan	1+2+3	4+5
11	Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)	91,5%	8,5%
12	Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)	79,1%	20,9%
13	Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat	85,6%	14,4%
14	Peraturan ketenagakerjaan	93,2%	6,8%
15	Keamanan lokal	80,4%	19,6%
16	Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah	90,1%	9,9%
17	Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan	92,1%	7,9%
18	Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya	63,0%	37,0%